

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

PERDA KOTA CIREBON NOMOR 6 TAHUN 2019

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

ABSTRAK : Untuk memenuhi ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 16 Tahun 1950 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 13 Tahun 1954, UU No 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 16 Tahun 2009, UU No 19 Tahun 1997 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 19 Tahun 2000, UU No 28 Tahun 1999, UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 20 Tahun 2001, UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 25 Tahun 2004, UU No 33 Tahun 2004, UU No 28 Tahun 2009, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015, UU No 30 Tahun 2014, PP No 109 Tahun 2000, PP No 23 Tahun 2005 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No 74 Tahun 2012, PP No 55 Tahun 2005, PP No 56 Tahun 2005 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No 65 Tahun 2010, PP No 65 Tahun 2005, PP No 8 Tahun 2006, PP No 39 Tahun 2007, PP No 5 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No 1 Tahun 2018 , PP No 69 Tahun 2010, PP No 71 Tahun 2010, PP No 2 Tahun 2012, PP No 27 Tahun 2014, PP No 12 Tahun 2017, PP No 17 Tahun 2018, PP No 33 Tahun

2018, PP No 56 Tahun 2018, PP No 13 Tahun 2019, Pepres No 32 Tahun 2014, Pepres No 16 Tahun 2018, Permendagri No 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011, Permendagri No 32 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permendagri No 123 Tahun 2018, Permendagri No 64 Tahun 2013, Permendagri No 77 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permendagri No 6 Tahun 2017, Permendagri No 19 Tahun 2016, Permendagri No 31 Tahun 2016, Permendagri No 11 Tahun 2017, Permendagri No 62 Tahun 2017, Perda Kota Cirebon No 8 Tahun 2005 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perda Kota Cirebon No 1 Tahun 2007, Perda Kota Cirebon No 9 Tahun 2008, Perda Kota Cirebon No 3 Tahun 2012 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perda Kota Cirebon No 2 Tahun 2014, Perda Kota Cirebon No 5 Tahun 2012 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perda Kota Cirebon No 3 Tahun 2014, Perda Kota Cirebon No 6 Tahun 2012, Perda Kota Cirebon No 7 Tahun 2013, Perda Kota Cirebon No 11 Tahun 2014, Perda Kota Cirebon No 1 Tahun 2015, Perda Kota Cirebon No 9 Tahun 2015, Perda Kota Cirebon No 10 Tahun 2015, Perda Kota Cirebon No 12 Tahun 2015, Perda Kota Cirebon No 6 Tahun 2016, Perda Kota Cirebon No 7 Tahun 2016, Perda Kota Cirebon No 13 Tahun 2017, Perda Kota Cirebon No 6 Tahun 2017, Perda Kota Cirebon No 7 Tahun 2018.

Perda ini mengatur tentang :

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, dengan sistematika sebagai berikut :

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat :

- a. laporan realisasi anggaran;
- b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. neraca;
- d. laporan operasional;
- e. laporan arus kas;
- f. laporan perubahan ekuitas; dan
- g. catatan atas laporan keuangan.

- STATUS :
- Mulai berlaku tanggal diundangkan
 - Diundangkan pada tanggal 8 Agustus 2019